

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Agensi**

Teori agensi (Jensen dan Meckling, 1976) dipilih sebagai dasar pengembangan model konsep dalam penelitian ini. Hal tersebut dipandang tepat karena tujuan pokok penelitian adalah untuk mengkonfirmasi model tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi pada suatu instansi yang sebenarnya merupakan salah satu perkembangan masalah dalam konteks hubungan antara prinsipal dan pimpinan (Thoyibatun, 2012).

Teori keagenan dilandasi oleh beberapa asumsi (Kusumastuti, 2012). Asumsi-asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*self interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi efisiensi sebagai kriteria efektivitas dan adanya asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. Asumsi informasi adalah bahwa informasi sebagai barang komoditi yang dapat diperjualbelikan.

Menurut Thoyibatun (2012) jika pimpinan selaku *owner* membagi kepemilikan organisasi kepada pihak lain misalnya mahasiswa atau orang tua

mahasiswa, maka antara pengelola perguruan tinggi dan orang tua mahasiswa atau mahasiswa itu sendiri selaku pemegang saham luar akan terjadi perbedaan kepentingan. Keadaan demikian membuat pemegang saham luar akan berusaha membelanjakan sumber daya agar dapat membatasi aktivitas pimpinan atau *owner manager* untuk tetap berada pada kontrak yang bertujuan memaksimalkan kesejahteraan pemilik luar. Namun, di sisi lain pimpinan sendiri juga memiliki karakteristik tertentu, misalnya berusaha untuk mengatur supaya tanggung jawabnya terjangkau dan meningkatkan kemampuan diri untuk dapat mengurangi pembelanjaan biaya serta memperoleh tambahan manfaat untuk dirinya.

Perkembangan struktur kepemilikan memberi gambaran semakin banyak kepentingan yang perlu diakomodasi dalam hubungan kontrak. Ada kemungkinan kepentingan tersebut saling bertentangan dan melebihi kapasitas yang wajar. Hal demikian mendorong pimpinan berperilaku tidak etis dan cenderung melakukan kecurangan akuntansi. Dua perilaku tersebut dipilih karena dipandang dapat memberikan peluang bagi kepentingan pimpinan.

Kondisi tersebut di atas juga memicu munculnya asimetri informasi baik yang disebabkan oleh *adverse selection* ataupun karena adanya *moral hazard* (Scott, 2005). *Adverse selection* berkaitan dengan masalah penyajian informasi kepada pihak yang bukan pimpinan, dan *moral hazard* berkaitan dengan usaha dan perilaku pimpinan yang menyimpang. Supaya masalah yang berkembang dapat berkurang, kedua pihak bisa mengatur kembali

kontrak yang disepakatinya dalam rangka memberi motivasi agar pimpinan mengikuti prosedur kerja dan aturan akuntansi yang berlaku.

*Agency theory* sangat erat hubungannya dengan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas manajemen terhadap investor atau pemegang saham, pihak agen perlu melakukan pengungkapan informasi kepada pihak prinsipal.

## 2. Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

Pada dasarnya, penipuan terjadi kapan saja, di mana saja dan oleh siapa saja. Hal ini sesuai dengan pernyataan Albrecht *et al.* (2006) bahwa “hampir semua bisa jujur”. Setiap manusia memiliki tujuan dan kebutuhan masing-masing dalam hidupnya. Untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan tersebut, kita dapat menggunakan cara apapun, baik jujur atau tidak jujur. Oleh karena itu, Singleton *et al.* (2006) mendefinisikan penipuan sebagai strategi untuk mencapai tujuan pribadi atau organisasi dan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara-cara yang tidak jujur. Menurut Kusumastuti (2012), kecurangan akuntansi dapat dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) apabila dilihat dari perspektif kriminal.

Namun, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) memiliki pernyataan yang berbeda untuk definisi kecurangan. IAI (2001) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai (1) salah saji terjadi dari penipuan dalam pelaporan keuangan, yaitu salah saji atau sengaja kelalaian jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk menipu pengguna laporan keuangan dan (2)

salah saji terjadi dari penanganan yang salah terhadap aset yang berkaitan dengan pencurian aset entitas menyebabkan penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. IAI menyatakan, tidak secara eksplisit, bahwa penipuan akuntansi adalah kejahatan.

IAI (2001) membedakan antara kecurangan dan kekeliruan. Jika risiko itu timbul atas dasar tindakan yang disengaja, diklasifikasikan sebagai kecurangan. Namun jika risiko timbul karena perbuatan tidak sengaja, disebut sebagai kekeliruan.

Menurut Thoyibatun (2012) kecenderungan kecurangan akuntansi diartikan sebagai adanya tindakan, kebijakan dan cara, kelicikan, penyembunyian, dan penyamaran yang tidak semestinya secara sengaja, yaitu dalam menyajikan laporan keuangan dan pengelolaan aset organisasi yang mengarah pada tujuan mencapai keuntungan bagi dirinya sendiri dan menjadikan yang lain sebagai pihak yang dirugikan.

Sehubungan dengan laporan keuangan kecenderungan kecurangan umumnya terjadi karena pengaruh lingkungan intern dan lingkungan ekstern (Armand, 2007). Hal tersebut diungkap sehubungan dengan laporan keuangan dan pengelolaan aset organisasi yang cenderung menyimpang dari Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP 2001 Seksi 316 (IAI, 2001) yang ditujukan untuk mencapai keuntungan diri sendiri dan menjadikan pihak lain sebagai korban yang dirugikan.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya mengenai kecurangan akuntansi, Shleifer dan Vishny (1993) dan Gavinira (2010) membuktikan

bahwa di suatu negara tingkat korupsi akan dipengaruhi oleh adanya kecurangan akuntansi. Timbulnya kecurangan akuntansi pada pemerintah merupakan pengaruh dari adanya internal birokrasi. Maksudnya, kecurangan akuntansi pada pemerintah akan menjadi rendah, apabila pengendalian birokrasinya semakin ditingkatkan (Mayangsari dan Wilopo, 2002). Pada penelitian ini, kecenderungan kecurangan akuntansi lebih mengacu pada definisi Singleton *et al.* (2006) yang mendefinisikan penipuan sebagai strategi untuk mencapai tujuan pribadi atau organisasi dan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara-cara tidak jujur.

### **3. Perilaku Tidak Etis**

Menurut Brooks dan Dunn (2007) dan Ernawan (2007) menjelaskan bahwa sebuah organisasi atau perusahaan dituntut untuk berperilaku etis terhadap apa yang dikerjakan, konsumen, atau masyarakat pada umumnya. Karena berkenaan dengan status organisasi yang sebagai badan hukum dipandang sebagai individu. Di mana hal tersebut dibuktikan dengan memenuhi berbagai tanggung jawab. Seorang manajer dituntut untuk bisa meningkatkan keuntungan organisasinya dan bisa memaksimalkan manfaat yang dapat diperoleh konsumen dengan adanya produk yang mereka hasilkan, hal ini akan memunculkan dilema etik seorang manajer. Sehingga memunculkan perilaku tidak etis dan berbagai kebijakan atau tindakan bias.

Menurut Griffin dan Ronald (2007) menyatakan bahwa perilaku tidak etis adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum, sehubungan dengan tindakan yang bermanfaat atau

yang membahayakan. Sedangkan menurut Shintadevi (2015), perilaku tidak etis merupakan perilaku menyimpang seseorang dalam mencapai tujuan tertentu yang berbeda dari tujuan sebelumnya yang telah disepakati.

Dijk (2000) mendefinisikan perilaku tidak etis sebagai perbuatan penyimpangan terhadap tugas pokok yang telah disepakati sebelumnya. Menurut Beu dan Buckley (2001) menyatakan bahwa perilaku menyimpang yang terjadi dapat merugikan orang lain sehingga perilaku yang menyimpang tersebut tidak dapat diterima secara moral. Dalam hal praktiknya, perilaku tidak etis mempunyai pola yang rumit. Sebagai gejala yang kompleks, perilaku tidak etis sangat bergantung terhadap interaksi antara karakteristik individu dengan fenomena asosial yang muncul dan juga lingkungan. Adanya sistem gaji, asuransi atas keamanan, dan perlindungan atas kerahasiaan laporan keuangan juga dapat menyebabkan terjadinya perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis akan berkembang menjadi bentuk yang kompleks apabila terus dibiarkan terjadi dan akan sulit untuk ditelusuri dan akan mengakibatkan kerugian.

Menurut Tang dan Chiu (2003), perilaku tidak etis dapat berupa penyalahgunaan kedudukan, sumber daya organisasi, kekuasaan, dan perilaku yang di mana tidak berbuat apa-apa sehubungan dengan jabatan dan kekuasaannya. Perilaku tidak etis dapat mengakibatkan timbulnya iklim kerja yang tidak sehat dan akan mendorong munculnya kecenderungan kecurangan akuntansi (Lane dan O'Connell, 2009), serta terganggunya akuntabilitas kinerja organisasi (Dijk, 2000; Beu dan Buckley, 2001).

#### 4. Pengendalian Internal

Pengendalian merupakan kegiatan yang memastikan terwujudnya atau berhasilnya tujuan dan sasaran organisasi melalui pemantauan yang dilakukan oleh manajemen. Menurut PP No. 8 Tahun 2006, pengendalian internal merupakan suatu proses yang melibatkan manajemen perusahaan untuk dapat menciptakan dan memberikan keyakinan yang memadai agar mencapai efektivitas, efisiensi, ketaatan atas perundang-undangan yang berlaku serta keterandalan penyajian laporan keuangan.

Menurut Halim (2003), pengendalian internal adalah suatu rangkaian proses yang dijalankan oleh entitas yang mencakup berbagai prosedur dan kebijakan sistematis, bermacam-macam serta memiliki tujuan utama, yaitu tetap menjaga keterandalan penyajian pelaporan keuangan entitas, efektif dan efisiensi operasional, serta kepatuhan akan hukum dan peraturan yang berlaku.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, 2009) mengelompokkan aktivitas-aktivitas pengendalian yang ada pada organisasi, yaitu:

- a. Pengendalian pencegahan (*preventive controls*), tujuannya yaitu untuk mencegah galat (*errors*) atau suatu kejadian yang tidak diharapkan terjadi.
- b. Pengendalian pendeteksian (*detektive controls*), tujuannya yaitu untuk memberitahukan kepada manajemen galat, masalah yang sedang berlangsung atau beberapa saat setelah kejadian.

- c. Pengendalian pemulihan (*corrective controls*), tujuannya yaitu untuk memulihkan kembali dari akibat terjadinya kejadian yang tidak diharapkan dan digunakan bersamaan saat pendeteksian.

Arens (2009) menjelaskan bahwa sistem pengenalian internal meliputi prosedur dan kebijakan yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan targetnya. Prosedur dan kebijakan ini disebut sebagai pengendalian, dan secara keseluruhan akan membentuk pengenalian internal entitas tersebut. Manajemen mempunyai tiga tujuan umum dalam hal merancang sistem pengendalian internal yang lebih efektif, yaitu:

- a. Reabilitas pelaporan keuangan

Tanggung jawab manajemen adalah untuk menyajikan laporan bagi para investor, kreditor, dan pemakai lainnya. Manajemen memiliki tanggung jawab hukum maupun profesionalitas untuk memastikan bahwa informasi yang telah disajikan tersebut secara wajar telah sesuai dengan kriteria pelaporan seperti yang dituangkan dalam Prinsip-prinsip Akuntansi yang Beterima Umum (GAAP). Pengendalian internal yang efektif bertujuan untuk memastikan bahwa tanggung jawab pelaporan keuangan telah terpenuhi.

- b. Efisiensi dan efektivitas operasi

Pengendalian di dalam perusahaan akan mendorong pemakai sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan target perusahaan. Mendapatkan informasi keuangan maupun non keuangan yang akurat



mengenai operasi perusahaan untuk kebutuhan pengambilan keputusan menjadikan pengendalian ini penting.

c. Ketaatan pada hukum dan peraturan

Seluruh perusahaan publik diwajibkan mengeluarkan laporan mengenai keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan.

Beberapa definisi di atas mengenai pengendalian internal dapat ditarik kesimpulan bahwa keefektifan pengendalian internal merupakan tercapainya tujuan instansi di mana hal tersebut bentuk dari keberhasilan manajemen dalam hal menjaga keterandalan penyajian laporan keuangan, efisiensi operasional, serta kepatuhan akan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian internal memiliki peran untuk mendeteksi dan mencegah timbulnya kecurangan akuntansi dalam suatu instansi.

## **5. Ketaatan Aturan Akuntansi**

Ketaatan adalah patuh atau menaati aturan yang ada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aturan adalah suatu cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan supaya dituruti atau dilakukan. Dalam suatu instansi, tentu saja terdapat aturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu kegiatan. Begitu juga dengan kegiatan akuntansi suatu instansi yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan akuntansinya.

Kewajiban organisasi atau perusahaan sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah menyajikan laporan akuntabilitas yang telah didelegasikan kepada pimpinan. Terdapat dua kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan pimpinan yang memiliki wewenang dalam hal

pengelolaan aset dan penyaji laporan keuangan dan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Dari pihak eksternal, terdapat beberapa pihak seperti investor, pemasok, kreditor, pelanggan, pemerintah, dan juga masyarakat umumnya. Semuanya memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda yang perlu dipenuhi organisasi tersebut. Sehingga, laporan keuangan perlu disajikan secara umum (IAI, 2004) namun juga harus terpenuhinya kualitas tertentu.

Agar kualitas tersebut dapat terpenuhi, SPAP menyebutkan bahwa untuk menyajikan laporan keuangan harus bebas dari salah saji material, baik itu disebabkan oleh kecurangan maupun kekeliruan. Dalam hal ini, pimpinan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dalam mengikuti prosedur pengelolaan aset dan pencatatan secara konsisten, serta menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat (IAI, 2004). Penerapan aturan akuntansi yang sehat oleh pimpinan perguruan tinggi bertujuan untuk mempertahankan kualitasnya selaku pemegang amanah. Sehingga, bisa membuktikan kepada pihak penilai kinerja mengenai mutu dan efisiensi aktivitas operasi mereka, dan juga bisa memberikan jaminan dan mutu kontrol kepada dan dari masyarakat (BAN PT, 2001; Lane dan O'Connell, 2009).

Laporan keuangan yang disajikan tanpa mengikuti aturan akuntansi yang berlaku merupakan bentuk kegagalan yang dapat menimbulkan perilaku tidak etis atau kecenderungan kecurangan yang sulit untuk ditelusuri auditor. Sehingga, ketaatan aturan akuntansi secara teoritis merupakan suatu keharusan. Menurut PP RI Nomor 24 Tahun 2005 menyatakan bahwa

ketaatan aturan akuntansi meliputi prosedur pengelolaan aset perusahaan pelaksanaan prosedur akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan diikuti sertakan bukti pendukungnya. Berdasarkan PSAK No. 1, perguruan tinggi dikatakan menaati aturan akuntansi apabila telah memenuhi persyaratan pengungkapan, informasi yang disajikan bermanfaat bagi kepentingan publik, obyektif, dan memenuhi syarat kehati-hatian serta memenuhi penyajian laporan keuangan yang konsisten (IAI, 2004).

Setiap entitas akuntansi diusahakan untuk menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan dan laporan kinerja yang merupakan persyaratan dari pengungkapan. Di mana laporan keuangan meliputi realisasi anggaran neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, sedangkan laporan kinerja meliputi ringkasan mengenai output dari masing-masing kegiatan dan input yang telah tercapai dari masing-masing program sebagaimana telah ditetapkan dalam APBN/APBD (PP RI Nomor 24/2005 tentang SAP). Laporan tersebut diharapkan dibuat sesuai peraturan yang ditetapkan SAP agar kinerja organisasi antar periode bisa dibandingkan.

## **6. Kesesuaian Kompensasi**

Kompensasi adalah komponen yang dianggap biaya oleh organisasi atau perusahaan yang dibayarkan kepada pegawainya. Dari sisi pegawai kompensasi diberikan merupakan penentu tingkat kesejahteraan sedangkan dilihat dari sisi organisasi kompensasi yang dibayarkan merupakan komponen biaya yang berpengaruh terhadap tingkat efisiensi dan profitabilitas. Sehingga dalam mendesain kompensasi organisasi perlu berhati-hati agar

kepentingan tersebut dapat diimbangkan. Membuat sistem kompensasi yang dapat mendorong agar pegawai berprestasi secara optimal merupakan sebuah tantangan bagi organisasi (Leopold, 2000).

Salah satu alasan seorang pegawai memberikan kinerja terbaiknya pada organisasi yaitu karena guna memperoleh kompensasi yang diinginkannya dan hal itu perlu diingat oleh organisasi dalam mendesain sistem kompensasi. Sebaliknya, organisasi akan memberikan kompensasi pegawai lebih tinggi bila pegawai bisa memberikan sumbangan yang signifikan pada pencapaian tujuan organisasi. Sejalan dengan keadaan tersebut Dallas (2002) menjelaskan bahwa sistem kompensasi hanya didasarkan atas kinerja fisik yang secara langsung diukur dengan satuan uang saja, akan mendorong iklim kinerja yang kurang nilai budi pekerti. Alasannya, dasar kompensasi tersebut mendorong pegawai hanya berorientasi pada nilai uang yang mereka harapkan dan mengabaikan nilai etika. Pendapat demikian dibuktikan kembali oleh He *et al.* (2009) bahwa kompensasi yang dibayar berhubungan negatif dengan independensi dewan direksi.

## **7. Asimetri Informasi**

Asimetri informasi adalah situasi di mana terjadi ketidakselarasan informasi antara pihak yang memiliki atau menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi (Wilopo, 2006). Asimetri informasi timbul karena prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen dan agen memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan.

Keadaan tersebut dapat memberikan kesempatan kepada agen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen. Hal ini memacu agen untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya. Beberapa organisasi, bawahan memiliki informasi lebih akurat yang dapat mempengaruhi pengukuran kinerja dibandingkan atasannya untuk itu bawahan yang memiliki informasi pribadi mengenai perusahaan ikut berpartisipasi sesuai dengan sistem pengendalian manajemen dengan menyampaikan atau menyertakan informasi pribadinya untuk dipadukan dengan standar anggaran pemerintahan dalam rangka penetapan kinerja pemerintah.

Adanya ketidakselarasan informasi dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk mendapatkan keuntungan mereka dan dapat merugikan pihak eksternal organisasi, seperti yang biasa terjadi yaitu membiarkan informasi terkait dengan investor (Scott, 2003). Menurut Scott (2000), asimetri informasi terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Adverse selection*, adalah informasi mengenai prospek dan keadaan organisasi yang lebih banyak diketahui oleh manajer dan pihak internal lainnya dibanding dengan pihak luar, yaitu investor. Memungkinkan pemegang saham tidak mendapatkan informasi yang dapat berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil.
- b. *Moral hazard*, adalah di mana para pemegang saham dan pemberi pinjaman tidak secara keseluruhan mengetahui tindakan seorang manajer

yang mungkin telah melanggar kontrak yang di mana secara etika tidak mungkin layak dilakukan oleh seorang manajer.

Asimetri informasi ditandai dengan terjadinya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen yang mencoba untuk saling memanfaatkan pihak lain demi keuntungan sendiri. Menurut Eisenhardt (1989) terdapat tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu: (1) pada umumnya manusia hanya mementingkan kepentingan sendiri (*self interest*) (2) terbatasnya daya pikir manusia akan persepsi masa depan (*bounded rationality*) (3) serta manusia berusaha menjauhi risiko (*risk adverse*). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang akan memberikan informasi untuk orang lain yang di mana informasi tersebut akan selalu muncul pertanyaan akan reliabilitas dan tingkat kepercayaan informasi yang disampaikan tersebut.

## **B. Hipotesis**

Menurut Sanusi (2011) hipotesis yaitu akibat dari adanya pemikiran secara rasional di mana dilandasi dengan teori, hukum, dalil, dan lainnya yang telah ada sebelumnya. Hipotesis juga disebut merupakan kebenaran yang diragukan. Adapun dalam penelitian ini hubungan tersebut antara lain:

### **1. Pengendalian internal dengan kecenderungan kecurangan akuntansi**

Menurut Kusumastuti (2012), kecenderungan kecurangan akuntansi dapat terjadi apabila ada peluang untuk melakukan hal tersebut. Peluang yang besar membuat kecenderungan kecurangan akuntansi lebih sering terjadi. Peluang tersebut dapat dikurangi dengan pengendalian internal yang baik.

Pengendalian internal yang baik akan mengurangi atau bahkan menutup peluang untuk melakukan tindakan kecurangan.

Tujuan dari pengendalian internal yang efektif adalah untuk menurunkan tingkat penyimpangan yang terjadi di mana hal tersebut melanggar aturan yang tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang dapat dilakukan dengan cara melakukan kecurangan akuntansi. Kecurangan akuntansi berkaitan erat dengan tindakan korupsi yang di mana adanya perilaku yang lazim terjadi yaitu dengan melakukan tindakan penyuapan, munculnya konflik kepentingan, dan pemberian tanda terimakasih yang tidak sah serta pemerasan secara ekonomi (Shintadevi, 2015).

Penelitian sebelumnya telah dilakukan dengan hasil negatif signifikan yakni pengendalian internal memengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi (Widiutami *et al.*, 2017), (Udayani dan Sari, 2017), (Dewi dan Ratnadi, 2017), (Aminah dan Faramitha, 2016), (Shintadevi, 2015), (Adinda dan Ikhsan, 2015), (Rachmanta dan Ikhsan, 2014), (Mustikasari, 2013), (Pramudita, 2013), (Zulkarnain, 2013), (Najahningrum, 2013), (Faisal, 2013), (Adelin, 2013), (Thoyibatun, 2012), dan (Wilopo, 2006).

Berdasarkan hasil penelitian Wilopo (2006), Thoyibatun (2012) dan Shintadevi (2015), untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kecurangan akuntansi dibutuhkan pengendalian internal sehingga semakin efektif pengendalian internal maka tindakan kecenderungan kecurangan akuntansi akan semakin rendah. Berdasarkan uraian tersebut peneliti menduga bahwa:

H<sub>1</sub>: Pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Perguruan Tinggi Swasta

2. Ketaatan aturan akuntansi dengan kecenderungan kecurangan akuntansi

Menurut Shintadevi (2015) ketaatan aturan akuntansi adalah segala ketentuan aturan akuntansi yang menjadi kewajiban organisasi untuk taat dan patuh pada pelaksanaan pengelolaan keuangan serta penyaji laporan keuangan untuk dapat menghasilkan akuntabilitas keuangan dan transparansi serta informasi laporan keuangan yang lebih efektif dan handal serta akurat. Kegagalan dalam penyusunan laporan keuangan disebabkan karena tidak mematuhi aturan akuntansi yang dapat memunculkan kecurangan dalam organisasi yang sulit untuk dideteksi oleh auditor. Menurut Thoyibatun (2012), suatu instansi atau lembaga akan cenderung melakukan perilaku curang apabila tidak berpedoman pada aturan akuntansi.

Apabila suatu instansi atau lembaga taat dan patuh pada aturan akuntansi yang berlaku, maka kecenderungan kecurangan akuntansi dapat diminimalisir. Ketaatan manajemen pada aturan akuntansi dapat memengaruhi hasil laporan keuangan yang efektif dan kegiatan-kegiatan operasional yang berjalan baik dan benar, serta dapat menghasilkan informasi yang handal dan akurat untuk pihak yang berkepentingan (Shintadevi, 2015).

Penelitian sebelumnya telah dilakukan dengan hasil negatif signifikan yakni ketaatan aturan akuntansi memengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi (Widiutami *et al.*, 2017), (Sukmawati, 2016), (Shintadevi, 2015),



(Adelin, 2013), (Kusumastuti, 2012), (Thoyibatun, 2012), dan (Wilopo, 2006).

Berdasarkan hasil penelitian Wilopo (2006), Thoyibatun (2012) dan Sukmawati (2016), ketaatan pada aturan akuntansi bisa mencegah dan meminimalisir perilaku kecenderungan kecurangan akuntansi, hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya ketaatan manajemen terhadap aturan akuntansi dapat menurunkan perilaku tidak etis dan terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi. Berdasarkan uraian tersebut peneliti menduga bahwa:

H<sub>2</sub>: Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Perguruan Tinggi Swasta

### 3. Kesesuaian kompensasi dengan kecenderungan kecurangan akuntansi

Teori agensi (Jensen dan Meckling, 1976) menjelaskan bahwa kesesuaian kompensasi yang diberikan dapat meminimalisir terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi. Diharapkan dapat membuat pegawainya merasa tercukupi atas kompensasi yang diterimanya sehingga dapat terhindar dari perilaku kecenderungan kecurangan akuntansi yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi dan akan berpengaruh terhadap kerugian instansi itu sendiri.

Menurut Shintadevi (2015), saat seorang pegawai tidak puas akan kompensasi yang diterimanya dari apa yang mereka berikan kepada perusahaan maka akan cenderung melakukan tindakan kecurangan akuntansi.

Perilaku kecurangan yang timbul dikarenakan adanya niat untuk meningkatkan keuantungan pribadi.

Menurut Khadarisman (2012) kompensasi yang diterima pegawai cenderung dijadikan penentu standar hidup pegawai serta mempengaruhi kedudukan sosialnya dalam masyarakat. Perilaku dan kinerja yang diberikan pegawai kepada perusahaan dipengaruhi oleh kompensasi yang diterimanya. Sehingga sangatlah penting untuk dapat memberikan kompensasi yang sesuai dengan keinginan pegawai.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan dengan hasil negatif signifikan yakni kesesuaian kompensasi memengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi (Virmayani *et al.*, 2017), (Aminah dan Faramitha, 2016), (Shintadevi, 2015), (Adinda dan Ikhsan, 2015), (Mustikasari, 2013), (Pramudita, 2013), (Zulkarnain, 2013), dan (Thoyibatun, 2012).

Berdasarkan hasil penelitian Thoyibatun (2012), dengan memberikan kompensasi yang sesuai dapat diharapkan mampu menanggulangi dan meminimalisir perilaku kecenderungan kecurangan akuntansi manajemen dalam instansi. Dalam instansi kesesuaian kompensasi yang diberikan dapat menurunkan perilaku tidak etis manajemen. Berdasarkan uraian tersebut peneliti menduga bahwa:

H<sub>3</sub>: Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Perguruan Tinggi Swasta

#### 4. Asimetri informasi dengan kecenderungan kecurangan akuntansi

Asimetri informasi adalah situasi di mana terjadi ketidakselarasan informasi antara pihak yang memiliki atau menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi (Sukmawati, 2015). Asimetri informasi ini membuat manajemen memanfaatkan ketidakselarasan informasi untuk keuntungan mereka serta sekaligus merugikan pihak luar perusahaan, seperti membiaskan informasi yang terkait dengan investor (Scott, 2003).

Salah satu teori yang digunakan dalam menjelaskan kecurangan akuntansi adalah dengan menggunakan teori keagenan oleh Jensen dan Meckling (1976). Demikian pula berkaitan dengan teori keagenan, Healy (2000) dan Lambert (2001) menyatakan bahwa keberadaan asimetri informasi akan menimbulkan permasalahan perilaku yang disfungsional bagi agen (manajemen perusahaan). Tujuannya yaitu untuk memecahkan masalah yang timbul dalam hubungannya dengan teori keagenan. Salah satu masalah yang muncul apabila kepentingan prinsipal dan agen bertentangan, yaitu di mana pada waktu prinsipal mengalami kesulitan untuk menelusuri tindakan yang dilakukan oleh agen. Apabila prinsipal dan agen berusaha memaksimalkan utilitasnya masing-masing, dan mempunyai keinginan serta motivasi yang memungkinkan berbeda, maka agen tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan dari prinsipal. Keinginan motivasi serta utilitas yang tidak sama itu akan merugikan bagi prinsipal (Sukmawati, 2016).

Menurut Kang (2002), pada keadaan adanya asimetri informasi, manajemen perusahaan akan menyajikan laporan keuangan yang akan

bermanfaat bagi mereka dengan motivasi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dan dapat mempertahankan jabatannya, dan lain-lainnya. Selain itu, dengan adanya asimetri informasi tersebut manajemen perusahaan dapat memanipulasi laporan keuangan sehingga dapat memperbaiki kompensasi dan reputasi manajemen, serta rasio-rasio keuangan perusahaan (Scott, 2003). Pendapat ini didukung oleh Albrecht dan Albrecht (2004), Green dan Calderon (1999), Reistein (1998) dan COSO (2002). Menurut Irianto *et al.* (2012) untuk menyelesaikan permasalahan agen, maka manajemen sepatutnya menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dengan benar.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan dengan hasil positif signifikan yakni asimetri informasi memengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi (Virmayani *et al.*, 2017), (Sukmawati, 2016), (Mustikasari, 2013), (Najahningrum, 2013), (Aranta, 2013), dan (Wilopo, 2006).

Berdasarkan hasil penelitian Sukmawati (2016) dan Wilopo (2006), menunjukkan bahwa pada kondisi organisasi atau lembaga yang memiliki asimetri informasi, pihak internal akan menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi mereka, demi motivasi untuk memperoleh keuntungan tertentu. Kondisi asimetri informasi ini membuat pihak internal organisasi memanfaatkan ketidakselarasan informasi untuk keuntungan mereka serta sekaligus merugikan pihak eksternal, seperti membiasakan informasi yang terkait dengan laporan keuangan. Adanya asimetri informasi tersebut memungkinkan adanya konflik yang terjadi antara prinsipal dan agen untuk

saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti menduga bahwa:

H<sub>4</sub>: Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Perguruan Tinggi Swasta

5. Pengendalian internal dengan kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis

Beu dan Buckley (2001) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh lingkungan (sebagai salah satu komponen pengendalian internal) yang ditata terhadap suatu usaha untuk meminimalisasikan perilaku tidak etis di dalam suatu manajemen, sedangkan Thoyibatun (2012) berpendapat bahwa kualitas pengendalian internal yang efektif akan berpengaruh pada tes transaksi dan tes detail terhadap neraca, aktivitas deteksi kecurangan, dan kejadian kecurangan dan semakin efektif pengendalian internal dalam suatu instansi maka semakin rendah pula kejadian kecurangan. Hal tersebut sependapat dengan Fauwzi (2011) yang menyatakan perilaku tidak etis dan perilaku menyimpang lainnya dapat dikurangi dengan adanya pengendalian yang efektif dalam suatu manajemen. Manajemen cenderung akan melakukan tindakan menyimpang untuk memaksimalkan keuntungan pribadi, salah satu contoh tindakan menyimpang dalam instansi adalah kecenderungan kecurangan akuntansi.

Pengendalian internal yang lemah atau longgar dapat memberikan peluang seseorang untuk melakukan perilaku tidak etis yang dapat merugikan

suatu instansi atau lembaga, maka dari itu suatu instansi atau lembaga harus memiliki sistem pengendalian internal yang efektif di mana setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan karyawan dalam instansi atau lembaga tersebut mendapatkan pengawasan yang ketat.

Berdasarkan penelitian Adelin (2013), Thoyibatun (2012), Fauwzi (2011) dan Wilopo (2006), pengendalian internal dapat mencegah dan menurunkan perilaku tidak etis manajemen yang berarti bahwa semakin efektif pengendalian internal di instansi, semakin rendah pula perilaku tidak etis karyawannya. Dengan demikian adanya pengendalian internal yang efektif diharapkan dapat meminimalisasikan perilaku tidak etis yang merujuk pada tindakan kecurangan akuntansi dalam instansi atau lembaga yang dapat merugikan instansi atau lembaga itu sendiri. Berdasarkan uraian tersebut peneliti menduga bahwa:

H<sub>5</sub>: Pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis pada Perguruan Tinggi Swasta

6. Ketaatan aturan akuntansi dengan kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis

Suatu instansi atau lembaga akan berperilaku tidak etis dan melakukan tindakan kecurangan karena mereka tidak berpedoman pada aturan akuntansi yang berlaku. Teori Jensen and Meckling (1976) dalam teori keagenan yang menyatakan bahwa taat terhadap aturan akuntansi dapat memperkecil

perilaku curang, sedangkan Wolk and Tearney (1997) menjelaskan bahwa kegagalan dalam menyusun laporan keuangan disebabkan oleh ketidaktaatan manajemen pada aturan akuntansi, di mana hal tersebut akan menimbulkan kecurangan perusahaan yang tidak dapat dideteksi oleh para auditor. Hal tersebut sependapat dengan Albrecht dan Albrecht (2003) yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang dari aturan berpengaruh terhadap pilihan kebijakan dan tindakan yang menguntungkan diri sendiri atau mengarah pada kecenderungan kecurangan akuntansi.

Taatnya manajemen pada aturan akuntansi yang berlaku dalam melakukan kegiatan-kegiatan akuntansi diharapkan dapat mengurangi perilaku tidak etis. Semakin taat perusahaan terhadap aturan akuntansi yang berlaku semakin rendah pula tindakan tidak etis yang dilakukan manajemen dalam instansi.

Berdasarkan penelitian Wilopo (2006) dan Thoyibatun (2009) ketaatan aturan akuntansi dapat mencegah dan mengurangi perilaku tidak etis manajemen dalam suatu instansi. Dengan demikian ketaatan suatu instansi terhadap aturan akuntansi yang berlaku diharapkan dapat mencegah dan meminimalisasikan perilaku tidak etis manajemen yang merujuk pada tindakan kecenderungan kecurangan akuntansi. Berdasarkan uraian tersebut peneliti menduga bahwa:

H<sub>6</sub>: Ketaatan aturan akuntansi berpegaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis pada Perguruan Tinggi Swasta

7. Kesesuaian kompensasi dengan kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis

Wright (2003) menyatakan bahwa kompensasi, insentif, pengawasan serta sistem yang berjalan dengan baik dapat mencegah perilaku tidak etis manajemen perusahaan, sedangkan Dallas (2002) menyatakan bahwa uang dan profitabilitas dijadikan kompensasi (tanpa dikontrol dengan sistem budaya berbasis etika), maka karyawan maupun manajemen dalam instansi akan tertarik untuk memperoleh keuntungan finansial yang besar dan semakin meningkat, hal tersebut menyebabkan karyawan akan semakin berani untuk berperilaku tidak etis. Pernyataan Dallas (2002) tersebut sependapat dengan Erickson *et al.* (2004) yang menyatakan bahwa struktur kompensasi dapat dijadikan alternatif manajemen untuk menurunkan tingkat kecurangan akuntansi, atau untuk meningkatkan kinerja dan kesadaran untuk mencapai kinerja.

Kesesuaian kompensasi dapat mempengaruhi perilaku karyawan. Seseorang cenderung akan berperilaku tidak etis dan berlaku curang untuk memaksimalkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Biasanya karyawan akan melakukan kecurangan karena ketidakpuasaan atau kekecewaan dengan hasil atau kompensasi yang mereka terima atas apa yang telah dikerjakan.



Berdasarkan penelitian Thoyibatun (2012) pemberian kompensasi yang sesuai akan menurunkan perilaku tidak etis manajemen dalam instansi. Dan semakin sesuai kompensasi yang diberikan manajemen kepada karyawan akan semakin rendah pula perilaku tidak etis. Dengan demikian kesesuaian kompensasi diharapkan dapat meminimalisasikan perilaku tidak etis dan tindakan kecurangan akuntansi. Berdasarkan uraian tersebut peneliti menduga bahwa:

H<sub>7</sub>: Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis pada Perguruan Tinggi Swasta

8. Asimetri informasi dengan kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis

Salah satu masalah yang akan muncul antara prinsipal dan agen adalah adanya suatu asimetri informasi. Menurut Widyaningdyah (2001) asimetri informasi merupakan keadaan di mana adanya ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen, di mana kurangnya informasi mengenai kinerja agen sebaliknya, agen mempunyai lebih banyak informasi secara keseluruhan tentang kapastian diri, lingkungan kerja dan perusahaan.

Manajemen perusahaan akan memanfaatkan keadaan di mana adanya ketidakselarasan informasi untuk mendapatkan keuntungan mereka dari adanya asimetri informasi tersebut sekaligus dapat merugikan pihak eksternal

perusahaan, seperti memberikan informasi yang bias kepada investor (Scott, 2003).

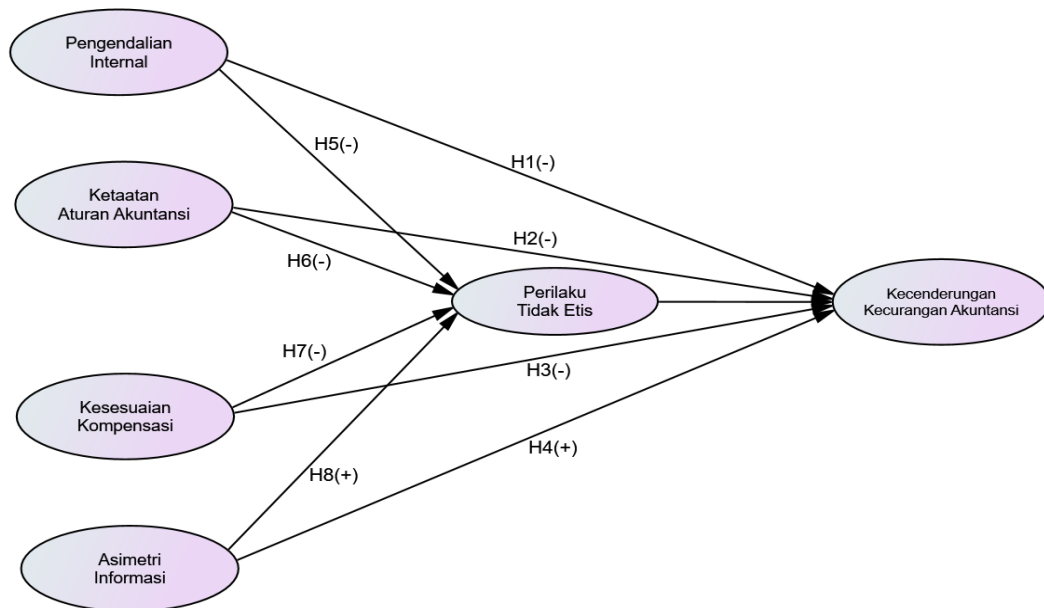
Berkaitan dengan teori keagenan, Healy (2000) dan Lambert (2001) menyatakan bahwa keberadaan asimetri informasi akan menimbulkan permasalahan perilaku yang disfungsional bagi agen (manajemen perusahaan). Hasil penelitian Dijk (2000) menunjukkan bahwa hubungan antara asimetri informasi dengan perilaku yang tidak etis, baik yang dilakukan bawahan maupun pihak luar perusahaan (auditor eksternal).

Berdasarkan penelitian Sukmawati (2016), Kusumastuti (2012) dan Wilopo (2006) dengan hasil positif signifikan menunjukkan bahwa adanya asimetri informasi akan menimbulkan ketidakselarasan informasi dapat dimanfaatkan oleh pihak internal organisasi untuk memperoleh keuntungan mereka serta sekaligus merugikan pihak eksternal. Dengan demikian, adanya asimetri informasi tersebut memungkinkan adanya konflik yang terjadi antara prinsipal dan agen untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri. Berdasarkan uraian tersebut peneliti menduga bahwa:

$H_8$ : Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi melalui perilaku tidak etis pada Perguruan Tinggi Swasta

### C. Model Penelitian

Berdasarkan kerangka teoritis dan hipotesis yang ada sehingga model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

Model Penelitian